

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara sebagai organisasi tertinggi (*top organization*) merupakan suatu identitas yang dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Unsur- unsur negara yang terdiri atas rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Mengisyaratkan bahwa negara yang diatur oleh suatu pemerintahan yang berdaulat merupakan manifestasi dalam mewujudkan harapan-harapan rakyat (masyarakat) dalam mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian hidup.

Masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam terbentuknya negara. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila masyarakat di dalamnya hidup dengan tentram dan sejahtera, oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus diutamakan dalam setiap pemerintahan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing, di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy*) dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Masyarakat yang baik merupakan masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus mempunyai pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Negara melaksanakan kebijakan untuk melayani masyarakat Menurut Suharto (2012, hlm. 82), kebijakan publik merupakan kebijakan sosial yang menyangkut kesejahteraan orang banyak, hal tersebut diutaran sebagai berikut:

“Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial. Karena urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik.”

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kebijakan ada yang berasal dari pusat dan berasal dari daerah karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengatur daerahnya sendiri termasuk membuat kebijakan yang membantu masyarakat.

Kota Bandung memiliki kebijakan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara program tersebut adalah E-Punten di Kota Bandung. Program tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pelaksanaannya adalah aplikasi pendaftaran untuk pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara di wilayah Kota Bandung. Program ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara serta menambah jumlah pemilik Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kota Bandung karena dengan program ini pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara lebih mudah.

Kota Bandung sebagai tempat para pendatang dari luar wilayah baik untuk bekerja dan kuliah. Para pendatang tersebut wajib memiliki administrasi kependudukan yang lengkap sebagai bukti diri. Untuk pendatang bukti diri yang harus dimiliki adalah Surat Keterangan Tinggal Sementara yang dibuat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dasar Hukum Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Non permanen Pasal 1 ayat (3) “Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat KTP yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap”.

Permasalahan identitas para pendatang selevel terjadi di kota besar seperti Bandung. Berdasarkan data statistik Kota Bandung para pendatang yang berada di Kota Bandung selalu banyak setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun para pendatang masih belum mengetahui mengenai pentingnya Surat Keterangan Tinggal Sementara. Alasan mereka tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah kurang pemahaman mengenai Surat Keterangan Tinggal Sementara dan malas untuk mengurus proses pembuatannya. Setelah adanya program E-Punten seharusnya mempermudah pendatang untuk membuat Surat

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keterangan Tinggal Sementara namun setelah adanya pogram tersebut banyak yang masih belum memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara bahkan masih banyak yang belum mengetahuinya. Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan data pendatang di Kota Bandung

Tabel 1.1
Data Pendatang di Kota Bandung pada Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Pendatang
1	2
2011	6.487.239
2012	5.080.584
2013	5.388.292
2014	5.627.421
2015	5.877.176
2016	4.827.589

(Sumber Badan Statistik Kota Bandung)

Pendatang yang datang ke Kota cukup tinggi setiap tahunnya baik untuk bekerja atau menempuh pendidikan, namun hanya beberapa saja yang memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara. Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang administrasi kependudukan adalah peraturan yang mengatur tentang prinsip- prinsip administrasi kependudukan yang baik. E- Punten merupakan efektifitas dari fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang efektif dapat menertibkan administrasi kependudukan bagi pendatang baru intuk mendapatkan Surat Keterangan Tinggal Sementara sehingga memepmudah pemerintah untuk mengomtrol penduduk yang berada di Kota Bandung terutama bagi pendatang.

Kebijakan E-Punten harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pendatang. Menurut Dunn (2000, hlm.32) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan-

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan ataupun kantor pemerintah”. Kutipan ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dari bidang-bidang yang bersangkutan dengan tugas pemerintah, misalnya saja seperti mengenai pemerintah keamanan, kesehatan, pertanian, energi, kesejahteraan sosial dan kriminaitas.

Kota Bandung membuat kebijakan E-Punten sebagai salah satu dari kebijakan yang mereka buat mengenai bidang kependudukan. Kebijakan perlu implementasi yang efektif agar kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut, masyarakat yang dalam penelitian ini adalah pendatang di Kota Bandung. Baik untuk pemerintah adalah kebijakan tersebut menjadi inovasi bagi pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat adalah kemudahan dalam mendapat hak mereka seperti Surat Keterangan Tinggal Sementara yang merupakan hak para pendatang untuk mendapatkannya.

Menurut Dye (dalam wahab, 2012, hlm. 14) “Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah”. kebijakan publik produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktifitas itu berlangsung sepanjang waktu). Dye mengatakan kebijakan publik sebagai pemecahan masalah publik yang ada di lingkungan tersebut.

Penelitian ini meneliti bagaimana upaya pelayanan E-Punten dalam meningkatkan kepemilikan Surat Keteangan Tinggal Sementara dari efektifitas kebijakan tersebut, kesadaran pendatang mengenai kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara, hambatan dalam pelaksanaan E-Punten dan solusi yang bisa diberikan. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai intansi kebijakan E-Punten tersebut dilaksanakan. Peneliti berharap jangan sampai kebijakan ini menjadi kebijakan yang kurang baik dan gagal karena kurang efektif.

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Oleh karena itu penelitian ini dinilai penting bagi peneliti karena kasus kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara merupakan masalah yang cukup besar bukan hanya mengenai administrasi kependudukan dan tertib hukum namun juga mengenai keamanan wilayah Kota Bandung karena dengan adanya Surat Keterangan Tinggal Sementara kejahatan seperti radikalisme, terorisme dapat dicegah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan rumusan masalah penelitian, yaitu “Bentuk Pelayanan E- Punten dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara.

1. Bagaimana Efektifitas E-Punten di Kota Bandung?
2. Bagaimana kesadaran pendatang Kota Bandung untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan E-Punen di Kota Bandung?
4. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas E- Punten di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberi gambaran bentuk pelayanan E- Punten yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yaitu:

- 1.3.2.1 Mengidentifikasi Efektifitas E- Punten.
- 1.3.2.2 Mengidentifikasi kesadaran pendaatang untuk mempunyai Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kota Bandung.

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1.3.2.3 Mengidentifikasi hambatan yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengatasi kendala dalam birokrasi pelayanan E- Punten .
- 1.3.2.4 Menganalisis upaya Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan kebijakan E- Punten.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis, praktis, kebijakan dan secara isu.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelayanan kependudukan.

1.4.2 Secara Praktis

Selain memberi manfaat secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat secara praktis. Adapun Manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

- 1.4.2.1 Hasil penelitian ini menggambarkan cara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pelayanan E- Punten.
- 1.4.2.2 Hasil penelitian ini menggambarkan hubungan antara pelayanan E- Punten dan kesadaran masyarakat memiliki identitas diri.

1.4.3 Secara Kebijakan

Manfaat secara kebijakan, pemerintah dapat dengan mudah membuat kebijakan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat

1.4.4 Secara Isu Serta Aksi Sosial

Manfaat secara isu diharapkan kebijakan yang dilakukan dapat menyadarkan pendatang akan pentingnya Surat Keterangan Tinggal Sementara.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sefta Nugraha Dwiputra, 2019

BENTUK KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTENTARA (SKTS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka dibuatlah struktur organisasi skripsi. Bagian ini menyajikan tentang urutan penulisan atau sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca.
4. Bab IV Temuan dan pembahasan, bab ini menyampaikan dua hal yang utama yakni (1) temuan peneliti berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian. (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya.
5. Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini berisi simpulan dan rekomendasi.